

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN PUBLIK, DESA MOSSO, KECAMATAN BALANIPA, KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kamaluddin¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Hasan Sulur Wonomulyo
Email: alifkhamal@gmail.com

ABSTRACT

To enhance information services for village government, one of the solutions is to implement an information system based on information technology that can support the effectiveness of services and facilitate data processing to be more efficient. This study aims to analyze the implementation of information technology policy in public services at the village level from the aspects of human resources, infrastructure, institutional frameworks, budgets, and IT services. The method used is a qualitative approach, aimed at providing a systematic, factual, and accurate description of the implementation of the policy. The research findings indicate that the application and development of information technology in service aspects have not yet reached the expected level.

ABSTRAK

Untuk meningkatkan layanan informasi bagi Pemerintahan Desa, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung efektivitas pelayanan dan memudahkan pengolahan data agar lebih efisien. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, anggaran, dan pelayanan IT. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pengembangan teknologi informasi dalam aspek pelayanan belum maksimal seperti yang diharapkan.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, IT, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik mengalami keterbatasan dalam infrastruktur teknologi di desa-desa. yang membutuhkan inovasi dalam penyelenggaraan layanan public Pada tingkat nasional, implementasi teknologi informasi menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam administrasi pemerintahan. Melalui penerapan TI, pemerintah desa dapat memperlancar prosedur administratif, meningkatkan standar layanan, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. meningkatkan mutu layanan, dan mengoptimalkan pemakaian sumber daya. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas teknologi, keterbatasan dana, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparatur desa dan masyarakat

Desa memiliki peran yang sangat penting, dalam pengembangan Nasional, karena desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Setiap kebijakan pembangunan nasional pasti berujung pada pembangunan desa, sebab pembangunan Indonesia tidak akan bermakna tanpa ada pembangunan. Bisa diartikan bahwa masa depan Indonesia tergantung pada keberhasilan kita dalam mengembangkan desa. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting. Walaupun pembangunan desa telah dilakukan sejak lama, hasil yang dicapai secara keseluruhan masih belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah, khususnya pedesaan, telah membuat layanan bagi masyarakat desa menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya Desa Digital, masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan tidak perlu datang ke kantor desa, cukup menggunakan ponsel. Namun, masih ada sebagian masyarakat desa yang belum terbiasa dengan teknologi. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai cara kerja Desa Digital juga masih kurang. Terlebih lagi, anak-anak sekolah dasar lebih cenderung mengutamakan aktivitas bermain

Dalam kapasitas sebagai pendorong perkembangan ke arah digitalisasi desa diharapkan mampu meningkatkan potensi desa. Potensi desa mencakup semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan demi kelangsungan serta kemajuan desa. yaitu potensi fisik dan non-fisik, yang terdiri dari sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM)

Pengaturan sistem Informasi Desa terdapat dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membahas Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 86. sistem informasi desa mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Dan Sistem informasi yaitu data desa, data pembangunan, kawasan

perdesaan, serta informasi lain tentang pembangunan desa dan kawasan perdesaan. yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat desa serta semua pemangku kepentingan. Sistem informasi ini diwajibkan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan pencatatan data dan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang dicatat dalam Buku Administrasi Desa. Terdapat beberapa jenis kegiatan administrasi pemerintahan di desa harus dilaksanakan dengan tertib, antara lain Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah yang terdiri beberapa bidang pelayanan yaitu, administrasi kependudukan dan pelayanan administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, pelayanan publik ini terdiri dari, Pelayanan Dokumen Kependudukan, penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Kebakaran, yang mencakup layanan terkait kebakaran di Kabupaten/Kota serta waktu tanggap (response time rate)

Mulyapradana et al. (2023) menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, terutama di tingkat pemerintahan daerah atau desa. Mereka mengungkapkan bahwa penerapan TIK dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas, Aksesibilitas Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Tantangan dan Kendala. Secara keseluruhan, prndapat diatas menyoroti bahwa meskipun penerapan TIK di pemerintahan desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan, perhatian terhadap tantangan yang ada juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Pengelolaan desa adalah komponen dari pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat di tingkat desa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan efisien di tingkat desa. Dengan demikian, pemerintah desa yang berfungsi sebagai level pertama dalam struktur pemerintahan diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan penyesuaian dalam menjalankan tugasnya (Apriyansyah, Maullidina, dan Purnomo, 2019). Namun, dalam implementasinya, seperti yang terjadi di Desa Mosso, yang terletak di Kecamatan Balanipa, pengguna website desa masih menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam beradaptasi, serta belum menerapkan aplikasi PRODEKSEL untuk memberikan pelayanan kepada warga desa

Sehubungan dengan bekal yang ada, desa seharusnya seharusnya dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Namun, Realitas yang ada ternyata berlawanan dengan harapan masyarakat. Pengelolaan pemerintahan desa masih terhambat oleh berbagai masalah, seperti kurangnya sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur. Hal ini tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak, termasuk institusi supradesa dan lembaga lain, seperti perguruan tinggi, untuk berperan aktif dalam mendorong kemajuan desa

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, terutama dalam keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur, seperti tidak adanya jaringan internet dan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Mengingat permasalahan ini, penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso, serta tantangan dan solusi yang dihadapi di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan teknologi informasi diterapkan di Desa Mosso, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan ini dapat mencakup identifikasi kendala yang dihadapi dan strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan implementasi teknologi di tingkat desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Mosso. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan dan pengalaman para pelaku kebijakan, aparatur desa, dan masyarakat lokal terkait dengan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada jenis data yang diperoleh, yang berupa deskripsi mengenai kondisi yang ada dilapangan. Data tersebut kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan sudut pandang informan, data sekunder, serta hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan tersebut

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi. Purposive sampling adalah teknik yang memungkinkan peneliti secara sengaja memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan

penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa sumber data tersebut memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mereka dijadikan informan penelitian. Beberapa kriteria yang mungkin digunakan meliputi, Aparat Pemerintah Desa setempat serta masyarakat secara langsung.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses ini mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi tata kelola desa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan desa dalam undang-undang ini ditujukan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap desa, memberikan kepastian hukum dan kejelasan status untuk memaksimalkan potensi dan aset desa guna mencapai kesejahteraan bersama; menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; serta meningkatkan kualitas layanan publik bagi warga desa

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengimplementasikan Teknologi Informasi desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, paradigma pembangunan desa mengalami perubahan, yang sebelumnya berpusat pada infrastruktur kini lebih mengarah pada pembangunan masyarakat desa

Di sisi lain, variasi sumber informasi juga akan memunculkan interpretasi yang berbeda. Untuk mencapai efektivitas dalam implementasi, orang yang bertanggung jawab atas keputusan harus mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sejatinya, implementasi kebijakan harus disetujui oleh seluruh personel, dan mereka harus memahami dengan jelas dan tepat mengenai maksud serta tujuan kebijakan itu. Apabila para pembuat kebijakan menyadari adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan, mereka sebenarnya tidak memahami arah yang sebenarnya

Upaya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa salah satunya adalah dengan mengimplementasikan layanan administrasi desa berbasis IT, Peneliti akan mengkaji penerapan kebijakan program desa digital dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan publik desa.

Komunikasi

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Mosso akan berhasil dengan baik jika tujuan kebijakan dipahami secara bersama oleh semua pihak. Sangat penting untuk menyediakan berbagai informasi mengenai ukuran dasar dan tujuan komunikasi, sehingga implementor dapat memahami maksud dari kebijakan yang ditetapkan. Keberagaman sumber informasi dapat menciptakan pemahaman yang berbeda, karena komunikasi di dalam organisasi adalah proses yang sangat kompleks dan urgent. Untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik, pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas harus mengetahui apakah mereka memiliki keterampilan yang diperlukan. Pelaksanaan kebijakan perlu dipahami dan diterima oleh seluruh tim pelaksana agar tujuan bersama yang telah ditetapkan dapat tercapai. Mengenai aspek komunikasi dalam pelaksanaannya, peneliti mengadopsi dua indikator untuk menilai keberhasilan komunikasi implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso, yaitu

Kejelasan informasi (Clarity)

Dalam pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Mosso, informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak menyebabkan kebingungan. Dengan demikian, pemerintah Desa Mosso adalah pihak yang berwenang dalam pembuatan dan pelaksanaan program ini terutama Kepala Desa sebagai penggagas dalam setiap program yang akan diatur dalam peraturan desa (Pedes), penyampaian informasi harus akurat.

Tujuan dan sasaran (Target Group)

Penerapan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi perlu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas agar setiap program dapat dilaksanakan dengan baik. Setiap tujuan program harus terdefinisi dengan jelas dan dilengkapi indikator pengukuran yang tepat untuk mencapai keberhasilan serta memastikan program berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Di Desa Mosso, terdapat tujuan tertentu dalam implementasi kebijakan ini, terutama untuk memudahkan akses dan pelayanan masyarakat di berbagai bidang, termasuk perekonomian dan pariwisata. Selain itu, semua layanan pemerintah desa dirancang untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan pihak desa, termasuk akses informasi, data, serta layanan penting seperti saran dan pengaduan. Salah satu tujuan lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan teknologi, termasuk promosi pariwisata lokal dan pengembangan UMKM. Implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi ini ditujukan kepada masyarakat desa dan

penduduk setempat, serta diharapkan dapat menarik pengunjung atau wisatawan yang berpotensi meningkatkan perekonomian melalui sumber daya pariwisata.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kesiapan tenaga kerja untuk layanan TIK administrasi. Berdasarkan kutipan George C. Edward III (1980) tentang sumber daya, peneliti menjelaskan tingkat keberhasilan dalam empat indikator, yaitu 1. Jumlah dan Kemampuan Staff

Desa Mosso dilengkapi dengan staf yang cukup kompeten, di mana pengelola seperti teknisi dan operator mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efisien dan kemampuannya yang tinggi sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan dapat dikurangi. Karena itu, penulis beranggapan bahwa sistem keamanan yang berbasis internet berisiko dibobol oleh orang lain untuk kepentingan pribadi mereka. Sejauh ini, belum ada kasus hacking yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso, Peneliti berkeyakinan bahwa tidak ada kekurangan tenaga kerja atau kompetensi dalam tim pelaksana, karena semua tantangan yang ada dapat diselesaikan dengan efektif

2. Informasi pelaksana kebijakan

Ada dua bentuk dalam pelaksanaan kebijakan informasi, yaitu mengenai penerapan kebijakan dan data tentang sejauh mana pelaksana mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat kekurangan informasi dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan terkait implementasi teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso. Apabila peraturan tidak ditetapkan, maka akan muncul berbagai permasalahan dan tantangan, di antaranya:

- a. Ketiadaan standar yang ditentukan serta tidak adanya regulasi resmi dari pemerintah desa. berpotensi mengakibatkan tidak tersedianya standar operasional (SOP) dalam pelaksanaan desa digital. Situasi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menilai keberhasilan program dan menyulitkan proses pemantauan maupun evaluasi yang diperlukan.
- b. Terbatasnya proteksi data dan tanpa aturan yang jelas, data milik masyarakat yang dikumpulkan oleh program teknologi informasi dan komunikasi berisiko tidak terlindungi secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran dalam perlindungan data, baik itu data pribadi maupun data publik, di Desa Mosso dan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar Menetapkan aturan yang jelas tentang implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan

publik sangatlah penting agar proses tersebut dapat berjalan dengan lebih baik, konsisten, dan transparan. Diharapkan, aturan tersebut akan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dan semua data yang ada, serta meningkatkan kepercayaan terhadap program yang diimplementasikan.

3. Kewenangan implementator

Sebuah program sebaiknya dioperasikan secara formal agar instruksi dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Tanggung jawab Pemerintah Desa Mosso adalah membuat dan menetapkan pedoman serta standar terkait implementasi kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa. Meskipun demikian, tanggung jawab tersebut masih belum terselesaikan karena lemahnya regulasi yang diterapkan di Desa Mosso. Dengan mengacu pada pernyataan itu, penulis mencatat bahwa tanggung jawab yang dimiliki belum berjalan sesuai yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan teknologi informasi di sektor pelayanan publik desa. Adanya kekurangan dalam regulasi yang disusun menjadikannya sebagai penghalang. Kebijakan program dapat terlaksana dengan baik jika didasarkan pada aturan dan instruksi yang jelas serta konsep program yang akan dilaksanakan. Untuk memastikan perkembangan yang baik, pemerintah harus dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaksana dalam menyusun kebijakan yang efektif

4. Fasilitas

Salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan adalah fasilitas. Walaupun implementator memiliki staf yang cukup dan berpengalaman, Pelaksanaan program tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari fasilitas yang tersedia. Dari pengamatan yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa fasilitas fisik yang ada untuk mendukung implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso cukup baik, meskipun jaringan internetnya masih kurang mendukung.

Disposisi

Disposisi merupakan refleksi komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terutama dari mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut, khususnya dalam aspek aparatur birokrasi. Dengan dukungan implementator dalam pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa, Oleh karena itu, kebijakan program tersebut akan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan dari awal. Namun, jika tim pelaksana atau implementator menunjukkan sikap yang negatif Ketidaksetujuan terhadap kebijakan karena adanya perbedaan pandangan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan

teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa, sehingga tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Penulis memusatkan perhatian pada penerapan kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di desa, yang diukur melalui tiga indikator, yaitu:

1. Konsep pelaksanaan
2. Petunjuk dan Respon Pelaksanaan
3. Daya Respon atau Tanggapan Pelaksana

Struktur Birokrasi

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik berjalan lancar di Desa Mosso, diperlukan kerja sama yang kuat dari semua pihak. Birokrasi yang tidak mendukung bisa menjadi penghalang bagi implementasi kebijakan, berpotensi mengganggu kelancaran program yang direncanakan. Menurut George C. Edward III (1980), salah satu ciri utama birokrasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan mengikuti SOP dalam setiap tahap program, pelaksana diharapkan dapat memanfaatkan waktu secara optimal dan menghadapi tantangan yang muncul. Penelitian ini menunjukkan bahwa penulis menemukan adanya hambatan dalam penerapan kebijakan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, akibat ketiadaan SOP yang diterapkan. Program dapat berjalan efektif jika SOP yang ada diterapkan dan dilaksanakan dengan baik

KESIMPULAN DAN SARANI.

I.Kesimpulan

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso Hasil penelitian dan diskusi yang didasarkan pada empat konsep menunjukkan bahwa kebijakan belum dilaksanakan secara optimal akibat beberapa kekurangan.

Komunikasi

Sebagai tolak ukur keberhasilan komunikasi, indikator komunikasi mencakup kejelasan informasi, tujuan, dan sasaran. Ketika informasi jelas, tidak ada miskomunikasi, dan informasi yang diberikan sudah tepat, hal ini membuat informasi diterima dengan baik dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Sementara itu, tujuan dan sasaran dari penerapan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik di Desa Mosso sudah sangat terang

dan dapat membantu membangun serta mengembangkan ke depannya dengan konsisten

Sumber Daya

Keberhasilan dipengaruhi oleh sumber daya yang meliputi jumlah dan kompetensi staf, kualitas informasi kebijakan, tanggung jawab pelaksana, dan ketersediaan fasilitas. Pada implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Mosso, jumlah staf cukup dan pelaksana berkompoten, terbukti dengan penyelesaian masalah secara efektif. Namun, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal meski aturan sudah rinci. Tanggung jawab pelaksana masih kurang maksimal karena lemahnya regulasi, yang menghambat kelancaran program. Fasilitas seperti komputer, perangkat lunak, jaringan informasi, dan komunikasi telah tersedia, meskipun kendala pada jaringan internet masih ada

Disposisi

Pencapaian sumber daya diukur melalui indikator disposisi, yang meliputi pemahaman pelaksanaan, arahan dan respons dalam pelaksanaan, serta intensitas tanggapan. Hal ini diterapkan dalam implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik di Desa Mosso. Pemahaman tentang pelaksanaan masih terbatas pada pemerintah desa dan tim pelaksana. Meski begitu, respons pelaksana terhadap program ini sudah sesuai harapan dalam memudahkan pelayanan masyarakat, dan intensitas tanggapan yang diberikan juga berjalan dengan baik.

Struktur Birokrasi

Kinerja struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Desa Mosso dinilai melalui SOP. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena SOP belum diterapkan pada setiap program, yang menyebabkan hambatan dalam implementasi

2. Saran

- a. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebaiknya memperluas jaringan internet guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih luas
- b. Diharapkan Pemerintah Desa Mosso dapat menerapkan aturan yang rinci dan jelas terkait pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dan

komunikasi dalam layanan publik

ACKNOWLEDGEMENT (OPTIONAL)

Terima kasih kepada Pimpinan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo telah memberikan supportnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Terima kasih kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Hasan Sulur Wonomulyo yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan artikel ini, Penghargaan juga didedikasikan untuk Pemerintah Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar atas persetujuan, partisipasi dan kontribusinya didalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB (2011). e-Government Capability Maturity Model: Improving Public Services through Information and Communication Technology. diunduh Dari <http://www.unap-cict.org/ecohub/e-Government-capability-maturity-model>
- Apriyansyah, Maullidina, I., & Purnomo, E. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Bakti, Bintu Humairah. (2015). Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CSS dan JQuery. Yogyakarta: ANDI
- Charalabidis Y., Gionis G., Lampathaki F. Askounis D., Metaksiotis K. (2006), Organising Municipal e-Government Systems: A Multi-Facet Taxonomy of eServices for Citizens and Businesses, Desa Cukurgondang Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. diunduh dari <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/kinerja-birokrasi-desa-dalam-meningkatkan-pelayanan-umum-di-desa-cukurgondang-kecamatan-grati-kabupaten-pasuruan-mega-clara-lulita-48942.html> diakses Rabu, 06 Februari 2013
- Heeks, Richard. 2001b. Understanding e-Governance for Development. i-Government Working Paper Series, Paper No. 11, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.h)
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Lulita, M. C. (2011). Kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum
- Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1983. Implementation and public policy London: Scoot, Foresman and company Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 4(1), 10-24. Subarsono. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyapradana, A. Anjarini, D, A, Harnoto (2023). Pengaruh Kualitas

- Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Tempo Cabang Tegal. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
Tentang
Desa Kepuasan Pelanggan di PT. Tempo Cabang Tegal. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No mor 72 Tahun 2005
Tentang Desa
Peratuarn Kepmenpan No. 63, th 2003 tentang Sarana teknologi dan pen dukungnya merupakan fokus dari pelayanan yang berbasis IT
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang jenis pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Desa
Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. ©2013,
Penerbit Alfabeta, Bandung.
UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Vintar, M, M Kunstelj, A Leben – 2002.